

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Identitas Pribadi

**Nama** : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.

**Tempat, Tanggal Lahir** : Pati, 3 Maret 1973.

**Jenis Kelamin** : Laki-laki.

**Agama** : Islam.



### Riwayat Pekerjaan

1. Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia periode 2022-2027.
2. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia periode 2017-2022.
3. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Pergantian Antar Waktu (PAW) periode 29 Agustus 2016 s.d. 11 April 2017.
4. Dosen pada Bagian Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang (sejak 1998-sekarang), dalam mata kuliah: Hukum Tata Negara; Hukum Otonomi Daerah; Hukum dan Politik; Hukum Konstitusi; Perbandingan Hukum Tata Negara; dan Teori Perancangan Hukum (*Legal Drafting*).
5. Dosen pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang (sejak 2013-sekarang), dalam mata kuliah: Hukum dan Sistem Politik, Hukum Pemilu, dan Hukum Keamanan Negara.
6. Dosen pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang (sejak 2013-sekarang), dalam mata kuliah: Ujian Kelayakan, Ujian Proposal dan Ujian Disertasi.
7. Dosen pada Program Studi Doktor Ilmu Sosial, Konsentrasi Kajian Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip), Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang (sejak 2013-sekarang), dalam mata kuliah: Analisis Kepemimpinan Politik, Analisis Politik Nasional, dan Kapita Selekta.
8. Dosen pada Program Doktor Ilmu Kepolisian, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Lembaga Pendidikan dan Latihan Kepolisian Republik Indonesia (Lemdiklatpolri), Jakarta (sejak 2016), dalam mata kuliah: Analisis Strategi Keamanan.

### Riwayat Pendidikan

1. Ph.D. (*Doctor of Philosophy*) dalam bidang Sosiologi Politik, Department of Anthropology and Sociology, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia, menulis Disertasi "*Konsolidasi Menuju Demokrasi: Kajian Tentang Perubahan Konstitusi dan Pilihan Raya 2004 di Indonesia*", lulus 2012.
2. Magister Sains (M.Si.) dalam bidang Ilmu Politik, Program Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, menulis Tesis "*Demokratisasi Melalui Civil Society: Studi Tentang Peranan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dalam Pemberdayaan Civil Society di Indonesia 1971-1996*", lulus 1998.
3. Sarjana Hukum (S.H.), Jurusan Hukum Tata Negara (HTN), spesialisasi Kajian Hukum dan Politik, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED), Purwokerto, menulis

Skripsi “*Pembreidelan Pers: Studi Terhadap Pembatalan SIUPP Sebagai Bentuk Pembatasan Kebebasan Pers*”, lulus 1995.

4. Pondok Pesantren Al-Hidayah, Karangsucu, Purwokerto (1991-1995).
5. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Kudus, Jurusan Fisika (A1) (1988-1991).
6. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Kudus (1985-1988).
7. Madrasah Diniyyah As-Salam, Panjunan Wetan, Kudus (1979-1988).
8. Sekolah Dasar Negeri (SDN) Panjunan, Kudus (1979-1985).

### **Pengalaman Kepemiluan**

1. Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia periode 2022-2027.
2. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia periode 2017-2022.
3. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Pergantian Antar Waktu (PAW) periode 29 Agustus 2016 s.d. 12 April 2017.
4. Ketua Tim Seleksi Anggota Panwas Pilkada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 2017, April-Mei 2016.
5. Peneliti Senior dan Konsultan Ahli untuk Tim Penyusun “Naskah Akademik dan Draft RUU Kitab Hukum Pemilu: Usulan Masyarakat Sipil (*Omnibus Law*)”, *Partnership for Governance Reform in Indonesia* (Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan Indonesia), Jakarta, (Januari-Mei 2015).
6. Konsultan Senior Ahli Pendaftaran Pemilih pada Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Jakarta (Juli 2013-Nopember 2014).
7. Ketua Tim Ahli (*Head of Expert Team*) Prakarsa Pendaftaran Pemilih KPU, Jakarta, (September 2011-Juni 2013).
8. Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota se Jawa Tengah untuk Pemilu 2014, Oktober 2012.
9. Sekretaris Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah untuk Pemilu 2014, Juli-September 2012.
10. Technical Consultant on Elections and Electoral Reform pada Cluster Democratic Governance, *Partnership for Governance Reform in Indonesia* (Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan Indonesia), Jakarta, (Oktober 2008-Juni 2011).
11. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah (2003-2008).
12. Sekretaris Presidium Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Pemilu 1999, Kabupaten Kudus (1998-1999).

### **Pengalaman Sebagai Peneliti**

1. Peneliti Senior dan Konsultan Ahli untuk Tim Penyusun “Naskah Akademik dan Draft RUU Kitab Hukum Pemilu: Usulan Masyarakat Sipil (*Omnibus Law*)”, *Partnership for Governance Reform in Indonesia* (Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan Indonesia), Jakarta, (Januari-Mei 2015).
2. Peneliti Senior dan National Advisor pada International Foundation for Electoral Systems (IFES), Jakarta (2011-2015).
3. Peneliti Senior dan Konsultan Ahli pada Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Jakarta (2013-2014).
4. Peneliti dan Technical Consultant on Elections and Electoral Reform pada Cluster Democratic Governance, *Partnership for Governance Reform in Indonesia* (Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan Indonesia), Jakarta (2008-2011).
5. Peneliti pada Pusat Kajian Konstitusi, Fakultas Hukum, UNDIP, Semarang (sejak 2008-sekarang).
6. Peneliti pada Pusat Kajian Hukum, Demokrasi dan Konstitusi, Fakultas Hukum, UNDIP, Semarang (sejak 1999-2008).
7. Peneliti pada Pusat Studi Kepolisian (PSK), Fakultas Hukum, UNDIP, Semarang (1999-2003).

8. Peneliti pada Pusat Studi Wanita (PSW), UNDIP, Semarang (1998-2001).
9. Peneliti pada Kelompok Kajian dan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (K2PMP), Dewan Riset Daerah (DRD) Jawa Tengah, Semarang (2001-2003).
10. Peneliti dan Sekretaris Eksekutif pada Central Riset dan Manajemen Informasi (CERMIN), Kudus (sejak 1999-sekarang).
11. Anggota Peneliti Ahli Bidang Hukum dan Kelembagaan, Proyek Pembinaan Bantuan Desa Tertinggal (PBDT), BAPPENAS, Jakarta, (2000).
12. Anggota Peneliti Ahli Bidang Hukum dan Kelembagaan, Proyek Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Daerah (PEMD), BAPPENAS, Jakarta, (1999).

### **Pengalaman Penerbitan**

1. Anggota Redaktur *Jurnal Konstitusi*, kerja sama Mahkamah Konstitusi dan Pusat Kajian Konstitusi, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang (2009-sekarang).
2. Anggota Redaktur Pelaksana, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang (2001-2004).
3. Anggota Redaktur Pelaksana, *Jurnal Media Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang (2001-2004).
4. Pemimpin Redaksi, *Buletin CERMINews*, Central Riset dan Manajemen Informasi (CERMIN), Kudus (sejak 2000-sekarang).
5. Pemimpin Redaksi Majalah Mahasiswa Fakultas Hukum, UNSOED, *PROJUSTITIA*, Purwokerto (1994-1995).
6. Wakil Pemimpin Redaksi Majalah Mahasiswa Fakultas Hukum, UNSOED, *PROJUSTITIA*, Purwokerto (1993-1994).
7. Redaktur Pelaksana Majalah Mahasiswa Fakultas Hukum, UNSOED, *PROJUSTITIA*, Purwokerto (1992-1993).

### **Pengalaman Organisasi**

1. Anggota Komisi Bidang Akademik dan Pengembangan Pengajaran, Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara (HAN), Jakarta (2015-2020).
2. Kepala Satuan Koordinasi Wilayah (Satkorwil) Banser Jawa Tengah, Semarang (2014-2018).
3. Ketua Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU), Bidang Demokrasi dan Pemilu, Jakarta (2012-2017).
4. Wakil Ketua Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Tengah (2010-2014).
5. Wakil Ketua Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia, Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (Lazis), Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Provinsi Jawa Tengah (2009-2014).
6. Ketua Divisi Hukum Asosiasi Pemangku Makam Auliya (PPMA) se Tanah Jawa (2009-2014) dan (2014-2019).
7. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah (2003-2008).
8. Sekretaris Komisi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Daerah Jawa Tengah, Semarang (2001-2006).
9. Anggota Lajnah Bahtsul Masa'il Diniyyah, Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNLU) Jawa Tengah, Semarang (2000-2003).
10. Sekretaris Presidium Komite Independen Pemantau Parlemen, Kabupaten Kudus (1999-2003).
11. Sekretaris Presidium Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Pemilu 1999, Kabupaten Kudus (1998-1999).
12. Anggota Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara (HAN), Semarang (sejak 1998).
13. Anggota Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia (ASHI), Semarang (sejak 1998).
14. Anggota Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (APII), Semarang (sejak 1997).

15. Koordinator Divisi Pers dan Advokasi Masyarakat, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Purwokerto (1994-1995).
16. Koordinator Lembaga Kajian Hukum dan Sosial (LKHS), Senat Mahasiswa Fakultas Hukum, UNSOED, Purwokerto (1994-1995).
17. Sekretaris Senat Mahasiswa Fakultas Hukum, UNSOED, Purwokerto (1993-1994).
18. Anggota Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakultas Hukum, UNSOED, Purwokerto (1991-1992).
19. Peserta Pertukaran Pemuda Antar Provinsi Jawa Tengah-Maluku, diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jawa Tengah (1990).
20. Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Jawa Tengah (1989).
21. Anggota Ikatan Putera Nahdlatul Ulama (IPNU) Cabang Kudus (1988-1991).
22. Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) SMAN 1 Kudus (1989-1990).
23. Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) SMPN 1 Kudus (1986-1987).

### **Prestasi yang Pernah Dicapai**

1. Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya X Tahun, dari Presiden Republik Indonesia berdasarkan Kepres RI No. 15/TK/Tahun 2012, tanggal 31 Maret 2012.
2. Beasiswa Program Doktor Luar Negeri yang dikelola oleh Direktorat Pengembangan Ketenagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti), Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) untuk menempuh Pendidikan Doktor, pada Department of Anthropology and Sociology, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia (2008-2011).
3. Beasiswa Bakti Pendidikan PT Djarum Kudus untuk menempuh Pendidikan Doktor, pada Department of Anthropology and Sociology, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia (2006-2008).
4. Beasiswa Penelitian dari Program Beasiswa Unggulan yang dikelola oleh Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Departemen Pendidikan Nasional (2006).
5. Pembimbing Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) Mahasiswa (Fakultas Hukum UNDIP) Juara III Bidang Ilmu Sosial Tingkat Nasional, di Universitas Indonesia, Depok (2000).
6. Beasiswa Pendidikan dan Penelitian dari *University Research for Graduate Education (URGE) World Bank* (1996-1998) yang dikelola Dirjen Dikti Depdikbud untuk menempuh Pendidikan Pascasarjana UGM, Yogyakarta (1996-1998).
7. Mahasiswa Berprestasi Utama I Tingkat UNSOED, Purwokerto, selanjutnya ikut seleksi Mahasiswa Berprestasi Tingkat Nasional dan mengikuti Upacara Peringatan 50 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta (1995).
8. Juara II Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) Mahasiswa Bidang Ilmu Sosial, UNSOED, Purwokerto (1994).
9. Juara IV Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) Mahasiswa Bidang Ilmu Sosial, Tingkat Wilayah B, di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga (1994).
10. Juara I Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) Mahasiswa Bidang Ilmu Sosial, UNSOED, Purwokerto (1993).
11. Beasiswa Bakti Pendidikan dari PT Djarum Kudus, untuk menempuh pendidikan sarjana pada Fakultas Hukum, UNSOED, Purwokerto semester 5 dan 6 (tahun ketiga) dan semester 7 dan 8 (tahun keempat) (1993-1995).
12. Beasiswa Pendidikan dari Lembaga Pendidikan Primagama Yogyakarta, untuk menempuh pendidikan sarjana pada Fakultas Hukum, UNSOED, Purwokerto semester 1 dan 2 (tahun pertama) (1991-1992).

## **Buku, Publikasi Tulisan dan Laporan Penelitian**

### **Buku**

1. “Pemilihan Umum Sebagai Pelembagaan Kedaulatan Rakyat”, diterbitkan dalam buku *Negara Hukum Dalam Bingkai Pancasila*, diterbitkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Jakarta, April 2022, hlm. 29-69.
2. “KPU Dalam Kepungan Peradilan Pemilu: Hubungan Antar Lembaga Penyelenggara Pemilu Dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Supremasi Konstitusi Sebagai Pedoman”, diterbitkan dalam buku Hasyim Asy’ari et.al. (eds), *Menjaga Integritas Pemilu: Mengelola Sengketa Pemilu 2019*, (Yogyakarta: Thafamedia), Pebruari 2022, hlm. 3-35.
3. “Putusan Sesat: Permasalahan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Serang Banten”, diterbitkan dalam buku Hasyim Asy’ari et.al. (eds), *Menjaga Integritas Pemilu: Mengelola Sengketa Pemilu 2019*, (Yogyakarta: Thafamedia), Pebruari 2022, hlm. 257-275.
4. *Dinamika Negara Hukum: Relasi Negara, Hukum dan Masyarakat di Indonesia*, diterbitkan oleh Thafa Media, Yogyakarta, Agustus 2021.
5. *Konsolidasi Demokrasi: Pergulatan Politik Pemilu di Indonesia*, diterbitkan oleh Thafa Media, Yogyakarta, Maret 2019.
6. “Konsolidasi Partai Politik: Belajar dari Jawa Tengah”, diterbitkan dalam buku Hermawan Sulistyio (eds.), *Remah-Remah Transisi Demokrasi*, diterbitkan oleh Pensil 324, Jakarta, Juli 2016.
7. Naskah Akademik dan Draft RUU Kitab Hukum Pemilu: Usulan Masyarakat Sipil (*Omnibus Law*), diterbitkan oleh *Partnership for Governance Reform in Indonesia* (Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan Indonesia), Jakarta, Agustus 2015.
8. “Evaluasi Pemilu Legislatif 2014: Provinsi Jawa Tengah”, diterbitkan dalam buku Syamsuddin Haris (Eds.), *Evaluasi Pemilu Legislatif 2014*, diterbitkan oleh Electoral Research Institute dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta, Agustus 2015, hlm. 18-47.
9. “Negara dalam Pandangan Soepomo”, diterbitkan dalam buku Muhtar Said (Eds.), *Soepomo: Pergulatan Tafsir Negara Integralistik, Biografi Intelektual, Pemikiran Hukum Adat, dan Konstitusionalisme*, diterbitkan oleh kerja sama Pusat Studi Tokoh Hukum dan Thafa Media, Yogyakarta, Pebruari 2015, hlm. 111-164.
10. *Mekanisme dan Tahapan Penghitungan Perolehan Suara Menjadi Kursi DPR dan DPRD Pemilu 2014*, diterbitkan oleh Indonesia Parliamentary Center (IPC), Jakarta, April 2014.
11. *Panduan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan untuk PPK*, diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Pebruari 2014.
12. *Panduan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan untuk PPS*, diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Pebruari 2014.
13. *Panduan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS untuk KPPS*, diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Pebruari 2014.
14. “Bantuan Hukum Progresif: Belajar dari Pengalaman Lembaga Bantuan Hukum 1971-1996”, diterbitkan dalam buku Awaludin Marwan (Eds.), *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, diterbitkan oleh kerja sama Konsorsium Hukum Progresif Undip dan Thafa Media, Yogyakarta, November 2013, hlm. 900-916.
15. *Tata Kelola Internal Pengawasan Pemilu*, diterbitkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, Desember 2013.
16. *Panduan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih untuk KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*, ditulis bersama Partono Samino, diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Pebruari 2013.
17. *Panduan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)*, ditulis bersama Partono Samino, diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Pebruari 2013.

18. *Panduan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih untuk Panitia Pemungutan Suara (PPS)*, ditulis bersama Partono Samino, diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Pebruari 2013.
19. *Panduan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih untuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih)*, ditulis bersama Partono Samino, diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Pebruari 2013.
20. *Tata Kelola Internal, Struktur Hierarkis dan Perencanaan Strategis KPU: Modul Training Manajemen Pemilu untuk KPU Provinsi*, diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Juni 2013.
21. *Merancang Sistem Politik Demokratis: Menuju Pemerintahan Presidensial yang Efektif*, co-writer bersama Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto, diterbitkan oleh Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan Indonesia (Partnership for Governance Reform in Indonesia), Jakarta, September 2011.
22. *Menyederhanakan Waktu Penyelenggaraan Pemilu: Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah*, co-writer bersama Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto, diterbitkan oleh Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan Indonesia (Partnership for Governance Reform in Indonesia), Jakarta, September 2011.
23. *Membangun Sistem Kepartaian Pluralisme Moderat: Menyederhanakan Jumlah Partai Politik*, co-writer bersama Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto dan August Mellaz, diterbitkan oleh Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan Indonesia (Partnership for Governance Reform in Indonesia), Jakarta, September 2011.
24. *Menyetarakan Nilai Suara: Jumlah dan Alokasi Kursi DPR ke Provinsi*, co-writer bersama Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto, diterbitkan oleh Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan Indonesia (Partnership for Governance Reform in Indonesia), Jakarta, September 2011.
25. *Meningkatkan Keterwakilan Perempuan: Penguatan Kebijakan Afirmasi*, co-writer bersama Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto, diterbitkan oleh Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan Indonesia (Partnership for Governance Reform in Indonesia), Jakarta, September 2011.
26. *Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih: Mengatur Kembali Sistem Pemutakhiran Daftar Pemilih*, co-writer bersama Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto, diterbitkan oleh Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan Indonesia (Partnership for Governance Reform in Indonesia), Jakarta, September 2011.
27. *Menjaga Kedaulatan Pemilih*, co-writer bersama Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto, diterbitkan oleh Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan Indonesia (Partnership for Governance Reform in Indonesia), Jakarta, September 2011.
28. *Menjaga Integritas Pemungutan dan Penghitungan Suara*, co-writer bersama Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto, diterbitkan oleh Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan Indonesia (Partnership for Governance Reform in Indonesia), Jakarta, September 2011.
29. *Membuka Ruang dan Mekanisme Pengaduan Pemilu*, co-writer bersama Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto, diterbitkan oleh Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan Indonesia (Partnership for Governance Reform in Indonesia), Jakarta, September 2011.
30. *Hukum Pemilu*, diterbitkan Di jten Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, 2010.
31. *LBH: Demokratisasi dan Pemberdayaan Civil Society di Indonesia 1971-1996*, diterbitkan oleh Central Riset dan Manajemen Informasi (CERMIN) Kudus dan Pensil 324 Jakarta, Jakarta, Maret 2010.
32. *Hukum dan Politik*, Buku Ajar, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Oktober, 2009.
33. *Pembreidelan TEMPO 1994: Wajah Hukum Pers Sebagai Alat Represi Politik Negara Orde Baru*, diterbitkan oleh Central Riset dan Manajemen Informasi (CERMIN) Kudus dan Pensil 324 Jakarta, Jakarta, Oktober 2009.

34. *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Penyelesaian Sengketa Hukum Pemilu 2009*, Modul Pelatihan, diterbitkan oleh KPU kerja sama dengan Australia Election Commission (AEC), Jakarta, 2009.
35. “Konsolidasi Demokrasi Melalui Amandemen Konstitusi: Pengalaman Indonesia”, diterbitkan dalam buku Mohammad Redzuan Othman et.al. (eds.), *Setengah Abad Hubungan Malaysia-Indonesia*, diterbitkan oleh Arah Publications, Kuala Lumpur, Malaysia, Pebruari, 2009, Bab 12, hlm. 191-206.
36. *Sistem Pemerintahan Indonesia Menuju Presidensil*, diterbitkan oleh Diponegoro University Press, Semarang, 2007.
37. *Pilkada: Catatan Hukum dan Politik*, diterbitkan oleh Diponegoro University Press, Semarang, 2007.
38. *Teknik Pembentukan Undang-Undang*, diterbitkan oleh Diponegoro University Press, Semarang, 2007.
39. *Teknik Pembentukan Peraturan Daerah*, diterbitkan oleh Diponegoro University Press, Semarang, 2007.
40. *Jejak Para Wali dan Ziarah Spritual*, diterbitkan oleh Central Riset dan Manajemen Informasi (CERMIN) Kudus dan Balai Perlindungan Peninggalan Purbakala (BP3) Jawa Tengah kerja sama dengan Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006.
41. Editor Buku Masyhuri, *Bakar Pecinan: Konflik Pribumi vs Cina di Kudus Tahun 1918*, diterbitkan oleh Central Riset dan Manajemen Informasi (CERMIN) Kudus dan Pensil 324 Jakarta, Jakarta, 2006.
42. *Kontestan, Kandidat dan Administrasi Kampanye Pemilu*, diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, 2006.
43. “Sulitnya Memprediksi Demokrasi”, diterbitkan dalam Buku *Pilkada Langsung: Tradisi Baru Demokratisasi Lokal*, diterbitkan oleh Konsorsium Monitoring dan Pemberdayaan Institusi Publik (KOMPIP), Surakarta, Maret 2005, hlm. 92-98.
44. “Aspek *Electoral Regulation* Pilkada Langsung”, diterbitkan dalam Buku *Agenda Pilkada Langsung dan Kesiapan Masyarakat Daerah*, diterbitkan Lembaga Studi Pengembangan Partisipasi Publik dan Reforma Anggaran (LSP3RA), Boyolali, Desember 2004, hlm. 30-34.
45. *Profil Pesantren di Kudus*, diterbitkan oleh kerja sama Central Riset dan Manajemen Informasi (CERMIN) Kudus dengan Pemerintah Kabupaten Kudus, 2004.
46. Editor Buku Soeparto Tjitrodihardjo, *Menelusuri Pelaksanaan Otonomi Daerah*, diterbitkan oleh Penerbit Buku Aneka Ilmu, Semarang, September 2003.
47. Editor Buku dan menulis Pengantar Editor “Seorang Sosiolog, Sebuah Kepolisian, dalam Satu Dasawarsa” dalam Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, diterbitkan oleh Penerbit Buku Kompas, Jakarta, Maret 2002.
48. “Abdurrahman Sang Penakluk”, diterbitkan dalam buku M. Niphan Abdul Halim dan Muhammad Zaki (eds.), *Gus Dur Sang Penakluk Tanpa ‘Ngasorake’*, diterbitkan Dunia Ilmu dan LEPKISS, Surabaya, 2000.

## **Publikasi Tulisan**

1. Why Brokers Don’t Betray: Social Status and Brokerage Activity in Central Java, published on *Asian Affairs: An American Review*, 44:2, 52-68, May 12, 2017.
2. Tata Kelola Pemilu 2019, diterbitkan Harian *Kompas*, Selasa, 22 November 2016.
3. Jalan Tengah Jokowi, diterbitkan *Majalah Detik*, 16-22 Pebruari 2015.
4. Mempertahankan Pilkada Langsung, diterbitkan dalam *Jurnal Kajian Kasyf el-Fikr*, Vol. 1, No. 1, Juni 2014.
5. Kebebasan Pers dan Pembredelan Pers di Indonesia, diterbitkan dalam *Jurnal Konstitusi*, kerja sama Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Volume I, Nomor 2, Pebruari 2014.
6. Pers dan Kontrol Publik, diterbitkan Harian *Suara Merdeka*, 8 Pebruari 2014.
7. Politik “Menimbang Rasa” Pilgub Jateng, diterbitkan Harian *Suara Merdeka*, 27 Mei 2013.

8. Korupsi di Daerah dan Penguatan Kontrol Masyarakat, diterbitkan dalam *Masalah-Masalah Hukum*, Majalah Ilmiah Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro (UNDIP), Volume 42, Edisi No. 1, Semarang, Januari 2013.
9. Catatan untuk Anggota Baru KPU, diterbitkan *Harian Kompas*, 13 April 2012.
10. Arah Sistem Pendaftaran Pemilih Indonesia: Belajar dari Pengalaman Menuju Perbaikan, diterbitkan dalam *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Vol. 2, Pebruari 2012.
11. Politik Hukum Kebebasan Beragama di Indonesia, diterbitkan dalam *Pandecta*, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (Unnes), Vol. 6, No. 2, Juli 2011.
12. Mempertahankan Pilkada Langsung, diterbitkan *Harian Kompas*, 24 Maret 2011.
13. Ironi Demokrasi, diterbitkan *Harian Kompas*, 11 Januari 2011.
14. Refleksi 82 Tahun Bahasa Keadilan, diterbitkan *Harian Suara Merdeka*, 29 Oktober 2010
15. Misteri Kekuasaan, diterbitkan *Harian Suara Merdeka*, 18 Oktober 2010.
16. Kisah-Kisah Seputar Pilkada di Jawa Tengah, diterbitkan dalam *Jurnal Konstitusi*, kerja sama Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Volume I, Nomor 2, Juli 2010.
17. Menjaga Integritas Pemilukada Kendal, diterbitkan *Harian Sore Wawasan*, 11 Juni 2010.
18. Pilkada Kendal Sangga Stabilitas, diterbitkan *Harian Suara Merdeka*, 21 Mei 2010.
19. Potret Dinamika Politik Perkotaan, diterbitkan *Harian Suara Merdeka*, 19 April 2010.
20. Kontrol Masyarakat dan Reformasi Birokrasi Penegakan Hukum, diterbitkan *Tabloid Inspirasi*, 8 April 2010.
21. In Memoriam Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.: Begawan Yang Tawarkan Cara Pandang, diterbitkan *Harian Suara Merdeka*, 9 Januari 2010.
22. In Memoriam Gus Dur: Berpulanginya Sang Penakluk, diterbitkan *Harian Suara Merdeka*, 31 Desember 2009.
23. Perkembangan Teori Negara: Sebuah Tinjauan, diterbitkan dalam *Jurnal Konstitusi*, kerja sama Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Volume I, Nomor 1, Nopember 2009.
24. Kekosongan Hukum Pemilu, diterbitkan *Harian Suara Merdeka*, 14 Pebruari 2009.
25. Budaya Politik di Pentas Novel: Kajian Tentang PKI dan DI/TII dalam Novel Ahmad Tohari, diterbitkan dalam *Sabda Jurnal Kajian Kebudayaan*, Fakultas Sastra Universitas Diponegoro, Vol. 3, Nomor 1, April 2008.
26. Sistem Pemilu Ramah Perempuan: Sebuah Gagasan, diterbitkan dalam *Jurnal Egaliter*, Pusat Penelitian Wanita, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, No. 1, Nopember 2006.
27. Perubahan Politik di Jawa Tengah, diterbitkan *Harian Suara Merdeka*, 27 Desember 2006.
28. Rekomendasi Untuk Pilkada Ke Depan, diterbitkan dalam *Bulletin Info Pilkada*, diterbitkan KPU Provinsi Jawa Tengah, edisi Desember 2005.
29. Persoalan Hari “H” Pilkada, diterbitkan *Harian Suara Merdeka*, 15 September 2005.
30. Menjelaskan *Nonvoting Behavior* Dalam Pilkada, diterbitkan dalam *Bulletin Info Pilkada*, diterbitkan KPU Provinsi Jawa Tengah, edisi Agustus 2005.
31. Pilkada Depok Menuju Anarki?, diterbitkan *Harian Suara Merdeka*, 12 Agustus 2005.
32. Jika Pilkada Harus Diulang, diterbitkan *Harian Suara Merdeka*, 28 Juli 2005.
33. Kasus Keberatan Hasil Pilkada, diterbitkan *Harian Suara Merdeka*, 18 Juli 2005.
34. Menyoal “Keberatan” Terhadap Hasil Pilkada, diterbitkan dalam *Bulletin Info Pilkada*, diterbitkan KPU Provinsi Jawa Tengah, edisi Juli 2005.
35. Problematika Regulasi Pilkada dan Implikasinya, diterbitkan *Harian Suara Merdeka*, 20 April 2005.
36. Sulitnya Memprediksi Demokrasi, diterbitkan *Harian Suara Merdeka*, 22 Desember 2004.
37. Kritik Pengaturan Pilkada Langsung, diterbitkan *Harian Suara Merdeka*, 7 Desember 2004.
38. Menghitung Hari Pemilu Presiden, diterbitkan *Harian Suara Merdeka*, 5 Juli 2004.
39. Konsolidasi Demokrasi Melalui Amandemen Konstitusi: Pengalaman Indonesia, diterbitkan dalam *Masalah-Masalah Hukum*, Majalah Ilmiah Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro (UNDIP), Volume 32, No. 3, Semarang, Juli-September 2004.



40. "Wong Kudus: Bersikap Sak Titahe, Bergaya Maliter", diterbitkan Harian *Suara Merdeka*, 23 Juli 2003.
41. Suksesi Presiden Indonesia Dalam Tinjauan Hukum dan Praktek Ketatanegaraan, diterbitkan dalam *Media Hukum*, Jurnal Asosiasi Pengajar dan Profesi Hukum, Volume III, No. 3, Semarang, Juli-September 2002.
42. Gerakan Advokasi Mahasiswa: Dari Gerakan Moral Menuju Gerakan Struktural, diterbitkan dalam *Media Hukum*, Jurnal Asosiasi Pengajar dan Profesi Hukum, Volume III, No. 2, Semarang, April-Juni 2002.
43. Kekerasan Politik Seputar Pemilu 1999 di Jawa Tengah, diterbitkan dalam *Dinamika Sosial*, Jurnal Penelitian Universitas Airlangga (UNAIR), Volume 3, No. 1, Surabaya, April 2002.
44. Problem Identitas Warga Timor Timur Pasca-Penentuan Pendapat, diterbitkan dalam *Media Hukum*, Jurnal Asosiasi Pengajar dan Profesi Hukum, Volume III, No. 1, Semarang, Januari-Maret 2002.
45. Agama, Kapitalisme dan Perubahan Sosial Menurut Max Weber, diterbitkan dalam *Addin Media*, Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Edisi XV, Kudus, Januari 2001.
46. Mempertimbangkan Diskursus "Humane Governance", diterbitkan dalam *Masalah-Masalah Hukum*, Majalah Ilmiah Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro (UNDIP), Volume XXVIII, Edisi V, Semarang, April-Juni 1999.
47. Negara, *Civil Society* dan Demokratisasi: Studi Tentang YLBHI Sebagai Aktor Pro-Demokrasi, diterbitkan dalam *Berkala Penelitian Pascasarjana*, Universitas Gadjah Mada, Volume 11, No. (4 A), Yogyakarta, November 1998.
48. Dinamika "Negara Hukum" di Indonesia, diterbitkan dalam *Prospektif*, Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan (PPSK), Volume 9, No. 1, Yogyakarta, 1997.

### **Laporan Penelitian**

1. Elections Under Covid-19: The Indonesia Experience, *Research Report*, presented in International Seminar on "Halalan 2.0: Holding Free, Fair and Safe Elections in the New Normal", held by Ateneo School of Government, Ateneo de Manila University, Quezon City, Philippines, February 10, 2021.
2. Electoral Governance of The 2019 Election in Indonesia, *Research Report*, presented in International Seminar "The Road to Indonesian Legislative and Presidential Elections 2019", held by The Coral Bell School of Asia Pasific Affairs of The Australian National University, December 11, 2018.
3. Electoral Governance of The 2019 Election in Indonesia, *Research Report*, presented in International Seminar "The Law and Politics of Indonesia's Election: Possibility, Prospects and Challenges", held by University of New South Wales Law School, December 10, 2018.
4. KPU Sebagai Terlapor, Termohon, Tergugat dan Teradu: Hubungan Antar Lembaga Penyelenggara Pemilu Dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, *Laporan Penelitian*, dipresentasikan pada Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-5, diselenggarakan oleh Pusat Studi Konstitusi (Pusako), Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, di Batusangkar, 9-12 November 2018.
5. Inclusive Electoral Education Through Informal Education Channel, *Research Report*, presented in International Conference on Voter Education for Inclusive, Informed and Ethical Participation, held by Election Commission of India (ECI), New Delhi, India, October 19th-21st 2016.
6. Mendemokratiskan Partai Politik: Desentralisasi Pencalonan Dalam Pilkada, *Laporan Penelitian*, dipresentasikan pada Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-3, diselenggarakan oleh Pusat Studi Konstitusi (Pusako), Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, di Bukittinggi 5-8 September 2016.
7. Constitutional Change and Re-Designing the State: Towards Strengthening the Presidential System in Indonesia, *Research Report*, presented on International Conference on Asian Studies,

with special topic on “Constitutionalism in Asia” Panel, at International Christian University of Tokyo, Japan, July 2-3, 2016.

8. Pengaturan Hukum Pemilihan Kepala Desa, *Laporan Penelitian*, dibiayai oleh PNBPFakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tahun 2016, Juli 2016.
9. Peta Politik Jawa Tengah 2016, *Laporan Penelitian Mandiri*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tahun 2016, Mei 2016.
10. Evaluasi Pilkada Serentak 2015: Tinjauan Hukum Pemilu, *Laporan Penelitian*, dibiayai oleh PNBPFakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tahun 2016, Mei 2016.
11. Strategi Peningkatan Partisipasi Perempuan Pada Lembaga Legislatif di Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur, *Laporan Penelitian*, Riset Pengembangan dan Penerapan dibiayai oleh PNBPFakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tahun 2016, Pebruari 2016.
12. Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2014: Tinjauan Integritas Proses dan Hasil Pemilu, *Laporan Penelitian*, dibiayai oleh PNBPFakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tahun 2015, Juli 2015.
13. Sistem Pemilu 2014, *Laporan Penelitian Mandiri*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, September 2014.
14. Sistem Pendaftaran Pemilih Pemilu 2014, *Laporan Penelitian*, dibiayai oleh PNBPFakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tahun 2014, Juli 2014.
15. Sistem Pendaftaran Pemilih di Indonesia: Rekomendasi Alternatif Menuju Pemilu 2014, *Laporan Penelitian*, DIPA Fakultas Hukum, UNDIP, Tahun 2011, November 2011.
16. Sistem Pendaftaran Pemilih di Indonesia: Penelitian Lapangan di Empat Provinsi (Lampung, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Jawa Timur), *Laporan Penelitian*, Prakarsa Pendaftaran Pemilih KPU, Oktober 2011.
17. Hukum Pemilu: Studi Perbandingan Hukum Pemilu di Indonesia dan Belanda, *Laporan Penelitian*, DIPA Fakultas Hukum, UNDIP, Tahun 2011, Juli 2011.
18. Penataan Ketatanegaraan Republik Indonesia (Studi Lembaga Penunjang Negara [*Auxillary State Organ*] Dalam Rangka Mewujudkan Sistem Ketatanegaraan Yang Efektif Dan Efisien), *Laporan Penelitian*, Dewan Ketahanan Nasional kerja sama dengan Fakultas Hukum UNDIP, Tahun 2010, Desember 2010.
19. Mahkamah Konstitusi dan Pemilu: Studi Analisis Terhadap Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi Seputar Penyelenggaraan Pemilu, *Laporan Penelitian*, DIPA Fakultas Hukum, UNDIP, Tahun 2010, Juni 2010.
20. Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2009, *Laporan Penelitian*, DIPA Fakultas Hukum, UNDIP, Tahun 2010, Juni 2010.
21. Evaluasi Atas Isu Dana Kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2009”, *Laporan Penelitian*, sebagai Ketua Tim Ahli dalam riset yang diselenggarakan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dan DRSP-USAid, Jakarta, Oktober 2009.
22. Jalan Menuju Konsolidasi Demokrasi: Studi Tentang Amandemen Konstitusi dan Implementasinya Pada Pemilu 2004 di Indonesia, *Laporan Penelitian*, Program Beasiswa Unggulan DIPA Tahun 2006 No. 0004.3/023-1.0/-/2006 Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Depdiknas, Fakultas Hukum, UNDIP, Semarang, Mei 2007.
23. Kajian Terhadap Implementasi Kebijakan Pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Publik di Indonesia, *Laporan Penelitian*, Hibah Bersaing XII Tahun Anggaran 2004/2005, Fakultas Ekonomi, UNDIP, Semarang, Juli 2005.
24. Pengaruh Gender dan Disiplin Ilmu Terhadap Evaluasi Etis (*Ethical Evaluation*), Orientasi Etis (*Ethical Orientation*) dan Intensi Etis (*Ethical Intention*) Dalam Potensi Rekrutmen Staf Profesional Pada Kantor Akuntan Publik, *Laporan Penelitian*, Kajian Wanita, Lembaga Penelitian, UNDIP, Semarang, Nopember 2004.
25. Profil Pesantren di Kudus, *Laporan Penelitian*, kerja sama Central Riset dan Manajemen Informasi (CēRMIN) Kudus dengan Pemerintah Kabupaten Kudus, 2004.
26. Praktek *Voluntary Disclosure* Dalam Laporan Keuangan Sebagai Pendukung Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Perusahaan Publik di Indonesia, *Laporan Penelitian*, Hibah

- Bersaing XI Tahun Anggaran 2004/2005, Fakultas Ekonomi, UNDIP, Semarang, Nopember 2004.
27. Praktek *Voluntary Disclosure* Dalam Laporan Keuangan Sebagai Pendukung Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Perusahaan Publik di Indonesia, *Laporan Penelitian*, Hibah Bersaing XI Tahun Anggaran 2003/2004, Fakultas Ekonomi, UNDIP, Semarang, Nopember 2003.
  28. Pemberdayaan Masyarakat Karimunjawa Kabupaten Jepara, *Laporan Penelitian*, kerja sama Central Riset dan Manajemen Informasi (CERMIN) Kudus dengan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Jawa Tengah, 2003.
  29. Rencana Induk Pemberdayaan Perempuan (RIPP) Jawa Tengah Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Laporan Penelitian*, Bappeda, Jawa Tengah, Semarang, 2003.
  30. Studi tentang Profil Kebijakan Pemberdayaan Perempuan di Propinsi Jawa Tengah, *Laporan Penelitian*, diorganisir oleh Dewan Riset Daerah (DRD) Jawa Tengah dan dibiayai oleh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, Semarang, 2001.
  31. Judicial Review: Studi Tentang Kewenangan Mahkamah Agung dalam Melaksanakan Hak Uji Material, *Laporan Penelitian*, Fakultas Hukum, UNDIP, Semarang, 2000.
  32. Studi Perlindungan Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus pada 20 Kabupaten dan Kota di 10 Propinsi Indonesia, *Anggota Peneliti Ahli Bidang Hukum dan Kelembagaan*, *Laporan Penelitian*, Proyek Pembinaan Bantuan Desa Tertinggal (PBDT), BAPPENAS, Jakarta, 2000.
  33. Studi Kebijakan Pemerintah Pusat yang Berkaitan dengan Manajemen Pembangunan Pemerintahan Daerah: Studi Kasus pada Kabupaten Kepulauan Riau dan Lebak, *Anggota Peneliti Ahli Bidang Hukum dan Kelembagaan*, *Laporan Penelitian*, Proyek Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Daerah (PEMD), BAPPENAS, Jakarta, 1999.
  34. Demokratisasi Melalui *Civil Society*: Studi Tentang Peranan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dalam Pemberdayaan *Civil Society* di Indonesia 1971-1996, *Tesis Magister Ilmu Politik*, Program Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, 1998.
  35. Pembreidelan Pers: Studi Terhadap Pembatalan SIUPP Sebagai Bentuk Pembatasan Kebebasan Pers, *Skripsi Sarjana*, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED), Purwokerto, 1995.
  36. Haatzaai Artikel: Keterkaitan Paham Kekuasaan Jawa dan Politik Stabilitas (Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Pasal 154 KUHP, *Laporan Penelitian*, Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) mahasiswa, Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED), Purwokerto, 1994
  37. Tinjauan Hukum Terhadap Pasal 131 dan 163 *Indische Staatsregeling* (I.S.) Dalam Peranannya Melahirkan Struktur Majemuk Masyarakat Indonesia, *Laporan Penelitian*, Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) mahasiswa, Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED), Purwokerto, September 1993.

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan selanjutnya agar digunakan sebagaimana mestinya.

**Jakarta, Juli 2022**

**Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**